

## DIPLOMASI IKLIM NEGARA-NEGARA PASIFIK DALAM FORUM CONFERENCE OF THE PARTIES (COP): STRATEGI TEKANAN MORAL DAN PENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN GLOBAL

Ribi Septianti\*, Muhammad Andryan Dafriansyah

Universitas Sriwijaya

Email: ribiseptiyanti30@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji diplomasi iklim negara-negara Pasifik, khususnya Tuvalu dan Kiribati, dalam forum Conference of the Parties (COP) periode 2021–2024 (COP26–COP29). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus dan kerangka Small State Theory, penelitian ini menganalisis strategi tekanan moral yang digunakan sebagai instrumen pengaruh terhadap kebijakan negara besar, terutama Australia. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik berhasil mengonstruksi legitimasi moral melalui narasi kerentanan eksistensial, membentuk koalisi kolektif melalui AOSIS dan P-SIDS, serta memanfaatkan forum multilateral sebagai arena normatif. Strategi naming, shaming, and framing terbukti efektif meningkatkan biaya reputasi Australia dan berkontribusi sebagai katalisator perubahan kebijakan iklim Australia pasca-2022. Meskipun demikian, pengaruh tersebut lebih dominan pada level normatif dibandingkan perubahan kebijakan material yang substantif, mencerminkan keterbatasan struktural yang masih melekat pada posisi negara kecil dalam sistem internasional.

**Kata kunci:** Diplomasi Iklim, Small Island Developing States (SIDS), Keadilan Iklim, Kewirausahaan Norma, COP UNFCCC, Diplomasi Multilateral, Kebijakan iklim Australia.

**Abstract.** This study examines the climate diplomacy of Pacific nations, particularly Tuvalu and Kiribati, in the Conference of the Parties (COP) forums from 2021 to 2024 (COP26–COP29). Using a qualitative descriptive-analytical approach with a case study method and Small State Theory framework, this research analyzes the moral pressure strategies employed as instruments of influence on major powers' policies, especially Australia. Findings indicate that Pacific nations have successfully constructed moral legitimacy through existential vulnerability narratives, built collective coalitions through AOSIS and PSIDS, and leveraged multilateral forums as normative arenas. The naming, shaming, and framing strategies proved effective in raising Australia's reputational costs and contributed as a catalyst for Australia's post-2022 climate policy shifts. Nevertheless, the influence is more dominant at the normative level than in substantive material policy changes, reflecting the persistent structural constraints on small states' positions in the international system.

**Keywords:** Climate Diplomacy, Small Island Developing States (SIDS), Climate Justice, Norm Entrepreneurship, UNFCCC COP, Multilateral Diplomacy, Australia's Climate Policy

Copyright©2026. Ribi Septiyanti, Muhammad Andryan Dafriansyah

This is an open access article under the CC–BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v3i2.73>

### PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjelma menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam tatanan global abad ke-21. Meskipun dampaknya bersifat universal, distribusi beban yang ditimbulkan oleh krisis iklim jauh dari proporsional. Negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik, khususnya Tuvalu dan Kiribati, menghadapi ancaman eksistensial berupa kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan fisik wilayah mereka, sementara kontribusi mereka terhadap total emisi gas rumah kaca global tidak lebih dari sepersekian persen (Robert Bosch Stiftung, 2023). Ketidakadilan struktural inilah yang menjadi bahan bakar utama diplomasi iklim negara-negara Pasifik di panggung internasional.

Correspondence Ribi Septiyanti  Email: ribiseptiyanti30@gmail.com

Diplomasi Iklim Negara-negara Pasifik dalam Forum Conference of the Parties (COP)

Dalam konteks ini, forum *Conference of the Parties (COP)* di bawah naungan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* menjadi arena utama bagi negara-negara kepulauan kecil untuk menyuarakan kepentingan mereka. COP bukan sekadar pertemuan teknis; ia merupakan ruang negosiasi normatif di mana narasi kerentanan, keadilan iklim, dan tanggung jawab moral negara-negara industri diperdebatkan dan dikonstruksi ulang. Bagi Tuvalu dan Kiribati, forum ini bukan pilihan diplomatik semata, melainkan arena perjuangan untuk kelangsungan hidup bangsa mereka sebagai entitas berdaulat (Intermestic, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena menarik dalam studi hubungan internasional, yakni meningkatnya pengaruh negara-negara kecil yang secara tradisional dipandang marginal dalam percaturan global. Melalui pembentukan koalisi multilateral seperti *Alliance of Small Island States (AOSIS)* dan *Pacific Small Island Developing States (P-SIDS)*, negara-negara Pasifik berhasil mengkonsolidasikan suara kolektif mereka menjadi kekuatan normatif yang diperhitungkan. Mereka tidak hanya hadir sebagai korban perubahan iklim, tetapi secara aktif memposisikan diri sebagai pemimpin moral dalam advokasi iklim global (Intermestic, 2025; IntechOpen, 2025).

Salah satu target utama tekanan diplomatik negara-negara Pasifik adalah Australia. Sebagai eksportir batu bara terbesar kedua di dunia dan negara tetangga paling berpengaruh di kawasan, Australia berada dalam posisi yang secara moral paradoks: di satu sisi ia mengklaim komitmen pada keamanan regional Pasifik, namun di sisi lain terus mendukung ekspansi industri bahan bakar fosil yang memperburuk ancaman terhadap negara-negara tetangganya tersebut (Tandfonline, 2024; Carter, 2024).

Pada COP26 di Glasgow tahun 2021, Australia menjadi satu-satunya negara maju yang menolak memperkuat target pengurangan emisi tahun 2030-nya, dan tidak menandatangani pledge pengurangan metana maupun pernyataan transisi energi bersih (University of Melbourne, 2022). Tekanan diplomatik dan moral yang berlangsung konsisten dari negara-negara Pasifik berkontribusi pada pergeseran kebijakan signifikan ketika pemerintahan Albanese mengambil alih kekuasaan pada 2022 dengan mengesahkan *Climate Change Act 2022* yang menetapkan target reduksi 43 persen emisi pada 2030 (PINA, 2022).

Fenomena ini menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer atau bobot ekonomi yang signifikan mampu menggerakkan perubahan kebijakan pada negara yang jauh lebih besar? Penelitian ini berfokus pada periode 2021 hingga 2024, meliputi COP26 hingga COP29, dengan pertanyaan utama: Sejauh mana diplomasi iklim negara-negara Pasifik dalam forum COP mampu memengaruhi arah kebijakan iklim negara besar seperti Australia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika diplomasi iklim negaranegara Pasifik dalam forum global COP. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti memerlukan interpretasi terhadap makna, narasi, serta praktik diplomasi yang bersifat kontekstual dan kompleks (Creswell & Poth, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dimensi-dimensi yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik, seperti konstruksi narasi moral, dinamika negosiasi, dan pergeseran norma internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*) yang berfokus pada dinamika diplomasi iklim negara-negara Pasifik dalam forum COP selama periode COP26 (2021) hingga COP29 (2024). Yin (2021) menegaskan bahwa studi kasus merupakan pilihan metodologi yang tepat ketika peneliti berupaya memahami fenomena kontemporer yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terdefinisi secara jelas. COP diposisikan sebagai arena utama di mana negara-negara Pasifik mengartikulasikan kepentingannya, sementara Australia diposisikan sebagai aktor target yang menjadi objek tekanan diplomatik.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis studi literatur (*library research*) yang diperkuat dengan analisis dokumen dan pernyataan resmi. Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Artikel jurnal ilmiah (2020–2025) yang membahas diplomasi iklim, *small state diplomacy*, dan politik lingkungan global;
- 2) Buku akademik dan laporan penelitian;
- 3) Laporan resmi dari organisasi internasional seperti IPCC dan UNFCCC; serta
- 4) Dokumen resmi hasil pertemuan COP seperti decision texts, deklarasi, dan kesepakatan internasional.

Penelitian ini juga mengandalkan analisis terhadap pidato kepala negara atau delegasi negara Pasifik dalam forum COP, pernyataan resmi pemerintah Australia terkait kebijakan iklim, serta dokumen kebijakan seperti *Climate Change Act 2022* Australia. Kombinasi berbagai sumber data ini bertujuan meningkatkan validitas melalui triangulasi data, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2021).

### **Kerangka Analisis**

Kajian mengenai diplomasi iklim negara-negara kecil, khususnya di kawasan Pasifik, telah berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Studi-studi yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama: (1) studi diplomasi iklim Pasifik secara historis dan kontemporer, (2) studi peran *small states* dalam rezim iklim internasional, serta (3) studi dinamika hubungan Australia dengan kawasan Pasifik dalam konteks perubahan iklim.

Pada klaster pertama, penelitian yang diterbitkan dalam *Intermestic: Journal of International Studies* (2025) mengkaji strategi kebijakan luar negeri Tuvalu sebagai *Small Island Developing State* (SIDS). Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, *Small State Theory*, dan *Climate Diplomacy*, studi tersebut menelaah dokumen COP26 hingga COP29 guna mengeksplorasi bagaimana Tuvalu mengubah identitas 'negara paling rentan' menjadi kekuatan tawar diplomatik. Temuan menunjukkan bahwa Tuvalu memanfaatkan tekanan moral, diplomasi simbolis, *identity framing*, dan jaringan AOSIS untuk mengamankan target 1,5°C dalam Perjanjian Paris (Intermestic, 2025).

Morgan, Carter, dan Manoa (2024) dalam *Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy* memberikan telaah historis komprehensif tentang bagaimana negaranegara Pasifik membangun kiprah diplomatiknya sejak Konferensi Bumi Rio 1992. Studi tersebut menegaskan bahwa sifat eksistensial ancaman perubahan iklim memberikan mereka otoritas moral yang unik dalam diskusi iklim global (Morgan, Carter, dan Manoa, 2024). Temuan ini sejalan dengan argumen McDonald (2021) yang menganalisis bagaimana wacana keamanan dalam konteks kepulauan Pasifik digunakan untuk memperkuat posisi negosiasi dalam forum multilateral.

Pada klaster kedua, Klöck dkk. (2024) melalui '*Beyond AOSIS: Small Island States' Presence and Participation at COP27*' memberikan analisis etnografis mendalam mengenai pengalaman negara-negara kepulauan kecil dalam negosiasi COP. Studi tersebut menemukan adanya ketimpangan yang mencolok di antara negara-negara pulau kecil dalam hal kemampuan berpartisipasi, mengingatkan bahwa kapasitas diplomasi moral tidak terdistribusi secara merata (Klöck dkk., 2024). Panke (2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara kecil dalam negosiasi multilateral sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun koalisi dan memanfaatkan norma internasional sebagai sumber leverage.

Pada klaster ketiga, Carter (2024) dalam '*A Dysfunctional Family: Australia's Relationship with Pacific Island States and Climate Change*' secara analitis mengkritisi pendekatan kebijakan luar negeri Australia, berargumen bahwa budaya strategis yang instrumental justru kontraproduktif terhadap hubungan produktif dengan mitra Pasifik. Ourbak dan Magnan (2022) menambahkan dimensi penting dengan menganalisis bagaimana Perjanjian Paris menjadi kerangka *governance* yang memungkinkan negaranegara kecil untuk mempengaruhi agenda iklim global secara lebih sistematis. Terdapat celah penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana keseluruhan strategi tekanan moral bekerja secara sistematis pada periode COP26–COP29, yang penelitian ini berupaya mengisinya

### **Kerangka Teori: Small State Theory**

Konsep MDO dikembangkan oleh U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC) untuk menjawab kebutuhan operasi militer dalam lingkungan yang semakin kompleks. Menurut U.S. Army Training and Doctrine Command (2018), MDO adalah pendekatan yang menekankan integrasi lintas matra, darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber— guna menciptakan efek strategis yang menyeluruh. Dalam paradigma MDO, setiap domain tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem pertahanan terpadu yang memungkinkan respons cepat dan fleksibel terhadap ancaman. Dengan mengadopsi pendekatan ini, JADC2 berfungsi sebagai kerangka komando yang menyatukan semua elemen pertahanan dalam satu jaringan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas misi dan interoperabilitas antar matra.

Lebih lanjut, MDO juga menegaskan pentingnya *decision superiority*, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat dibandingkan lawan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep *information dominance* yang menjadi inti dari strategi keamanan modern. Dalam konteks JADC2, keunggulan informasi dicapai melalui konektivitas sistem sensor, komando, dan penembak dalam satu jaringan digital terintegrasi (Freedberg, 2020). Dengan demikian, MDO menjadi dasar operasional yang memungkinkan JADC2 mendukung tujuan strategis keamanan nasional AS

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Kerentanan Ekologis sebagai Modal Diplomatik**

Negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik, khususnya Tuvalu dan Kiribati, menghadapi kondisi kerentanan geografis yang tidak tertandingi dalam sistem internasional kontemporer. Secara fisik, kedua negara tersebut tersusun atas atol karang dengan elevasi rata-rata tidak lebih dari dua meter di atas permukaan laut,

sehingga perubahan kecil sekalipun pada ketinggian muka air laut berpotensi mengakibatkan kerugian teritorial yang permanen. IPCC (2022) memproyeksikan bahwa kenaikan permukaan laut global antara 0,3 hingga 1 meter pada akhir abad ke-21 akan menyebabkan banjir permanen di sebagian besar wilayah atol rendah, termasuk Tuvalu dan Kiribati, yang secara efektif berarti hilangnya negara secara fisik dari peta dunia.

Namun yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini bukan sekadar skala ancaman tersebut, melainkan bagaimana kerentanan ekstrem itu dikonversi secara strategis menjadi sumber kekuatan diplomatik. Dalam kerangka Small State Theory, negara-negara kecil umumnya dipandang memiliki kapasitas pengaruh yang terbatas karena ketiadaan kekuatan material berupa militer dan ekonomi yang memadai (Novikova, 2022). Akan tetapi, negara-negara Pasifik berhasil melampaui logika keterbatasan material tersebut dengan menjadikan kondisi ekologis mereka sebagai basis legitimasi moral yang otentik dan sulit dibantah. Betzold (2020) mencatat bahwa strategi adaptasi yang ditempuh negara-negara SIDS tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga merupakan respons politik terhadap ketidakadilan distribusi dampak iklim global.

Implikasi sosial dan kemanusiaan dari krisis iklim di kawasan ini turut memperkuat narasi diplomatik mereka. Campbell dan Warrick (2023) mendokumentasikan bahwa migrasi yang dipicu perubahan iklim, intrusi air asin ke sumber air tawar, hingga hilangnya lahan pertanian, telah menjadi realitas nyata yang dialami komunitas-komunitas kepulauan Pasifik. Kondisi ini tidak lagi dapat direduksi sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah berevolusi menjadi ancaman terhadap keamanan manusia (human security) dan keberlangsungan negara sebagai entitas berdaulat. Dengan demikian, kerentanan ekologis bertransformasi menjadi modal diplomatik yang bernilai tinggi dalam forum-forum internasional, memberikan negara-negara Pasifik posisi unik sebagai aktor dengan otoritas moral yang tidak dimiliki oleh negara-negara industri besar.

## **2. Strategi Diplomasi Tiga Lapis dalam Forum COP**

Dalam menghadapi keterbatasan struktural yang melekat pada posisi mereka dalam sistem internasional, negara-negara Pasifik mengembangkan arsitektur diplomasi yang terdiri atas tiga lapis strategi yang saling melengkapi dan beroperasi secara sinergis. Kombinasi ketiga strategi ini memungkinkan negara-negara kecil untuk memaksimalkan pengaruh normatif mereka secara jauh melampaui proporsi kekuatan material yang mereka miliki.

Lapis pertama adalah diplomasi multilateral yang intensif. Negara-negara Pasifik tidak hanya hadir secara simbolis dalam forum COP, tetapi terlibat secara aktif dan taktis dalam seluruh tingkatan negosiasi, mulai dari working group teknis hingga plenary tingkat tinggi. Keterlibatan menyeluruh ini memastikan bahwa kepentingan negara-negara kepulauan kecil terartikulasikan di setiap tahapan proses pengambilan keputusan dalam rezim iklim internasional. Panke (2020) menegaskan bahwa keberhasilan negara-negara kecil dalam negosiasi multilateral sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun koalisi yang solid dan memanfaatkan norma internasional sebagai sumber leverage non-material.

Lapis kedua adalah pembentukan dan konsolidasi koalisi regional. Melalui Alliance of Small Island States (AOSIS) yang beranggotakan 44 negara dan mewakili

sekitar satu miliar penduduk di kawasan kepulauan serta pesisir rendah, maupun melalui Pacific Small Island Developing States (P-SIDS) yang lebih spesifik secara regional, negara-negara Pasifik berhasil mengkonsolidasikan suara-suara individual yang terfragmentasi menjadi kekuatan negosiasi kolektif yang signifikan. Klöck dkk. (2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketimpangan kapasitas yang mencolok di antara anggota AOSIS, keberadaan platform koalisi ini tetap memberikan amplifikasi yang bermakna terhadap suara negara-negara kepulauan kecil dalam dinamika negosiasi COP. Koalisi ini juga memungkinkan distribusi beban diplomatik yang efisien, di mana negara-negara dengan kapasitas lebih besar mengambil peran kepemimpinan teknis, sementara negara-negara yang lebih kecil berkontribusi melalui bobot suara kolektif.

Lapis ketiga adalah pemanfaatan media internasional dan arena publik global sebagai pengungkit opini. Strategi ini terwujud secara paling dramatis ketika Perdana Menteri Tuvalu Simon Kofe berpidato dari bawah laut pada COP26 di Glasgow tahun 2021, mengenakan setelan jas sambil berdiri di tengah lautan yang menggenang kakinya. Aksi simbolik ini bukan sekadar atraksi media, melainkan merupakan kalkulasi diplomatik yang cermat untuk mengubah abstraksi data ilmiah menjadi citra visual yang menggugah dan tak terlupakan. Carnegie Endowment for International Peace (2025) mencatat bahwa momen-momen simbolik semacam ini menciptakan dampak yang jauh melampaui liputan medianya langsung, karena membentuk citra yang tertanam kuat dalam ingatan kolektif komunitas internasional dan mengonstruksi persepsi moral tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim.

### **3. Tekanan Moral sebagai Instrumen Pengaruh: Mekanisme Naming, Shaming, dan Framing**

Inti dari keseluruhan strategi diplomasi negara-negara Pasifik terletak pada penggunaan tekanan moral (moral pressure diplomacy) sebagai instrumen utama dalam memengaruhi perilaku aktor-aktor yang lebih kuat secara material. Pendekatan ini mencerminkan apa yang oleh Finnemore dan Sikkink (1998) konseptualisasikan sebagai norm entrepreneurship, yakni upaya aktor-aktor tertentu untuk secara aktif mendefinisikan, mempromosikan, dan menginternalisasikan standar perilaku yang diterima dalam komunitas internasional. Negara-negara Pasifik tidak sekadar bereaksi terhadap agenda yang ditetapkan oleh negara-negara besar, tetapi secara proaktif membentuk kerangka normatif yang melaluinya isu perubahan iklim didiskusikan dan dinilai secara moral.

Mekanisme naming bekerja melalui identifikasi eksplisit dan terbuka terhadap negara-negara penghasil emisi besar sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami masyarakat kepulauan Pasifik. Dalam forum COP yang disiarkan secara global, pernyataan-pernyataan yang menyebut nama negara tertentu sebagai penanggung jawab memiliki efek politisasi yang jauh lebih kuat dibandingkan kritik generik yang tidak bertarget. Mekanisme ini kemudian dilanjutkan dengan shaming, yakni kritik publik yang terukur dan konsisten yang bertujuan meningkatkan biaya reputasi bagi negara-negara yang dinilai tidak memenuhi tanggung jawab moralnya. ODI (2025) menganalisis bahwa dalam era konektivitas informasi global, biaya reputasi akibat shaming publik dalam forum internasional

semakin signifikan sebagai faktor yang memengaruhi kalkulasi kebijakan domestik di negara-negara demokrasi.

Framing merupakan dimensi paling strategis dari triad tekanan moral ini. Ourbak dan Magnan (2022) menganalisis bagaimana keberhasilan negara-negara SIDS dalam membingkai perubahan iklim sebagai isu keadilan distributif dan tanggung jawab etis, bukan sekadar persoalan negosiasi teknis atau kepentingan ekonomi nasional, berhasil menggeser diskursus global secara fundamental. Framing ini efektif karena memanfaatkan kesenjangan yang nyata dan terukur antara negara-negara yang paling berkontribusi pada emisi historis global dengan negara-negara yang paling menanggung dampaknya. Narasi bahwa Tuvalu dan Kiribati hampir tidak menyumbang emisi global namun menghadapi kepunahan sebagai akibat emisi negara-negara industri menciptakan argumen moral yang sulit dilawan dalam arena publik internasional.

Ketiga mekanisme ini bekerja secara kumulatif dan saling memperkuat. Naming menciptakan visibilitas terhadap aktor dan masalah; shaming menciptakan insentif untuk merespons; dan framing menyediakan kerangka interpretif yang menguntungkan posisi negara-negara Pasifik. Keberhasilan memasukkan target 1,5 derajat Celcius ke dalam Perjanjian Paris 2015 merupakan bukti paling konkret dari efektivitas strategi ini, di mana UNFCCC (2023) mengakui bahwa tekanan yang konsisten dari blok negara-negara kepulauan kecil menjadi salah satu faktor penentu dalam mempertahankan ambisi target tersebut di tengah resistensi dari negara-negara emisi besar.

#### **4. Australia sebagai Target Tekanan: Paradoks Kebijakan dan Respons Adaptif**

Di antara seluruh target tekanan diplomatik negara-negara Pasifik, Australia menempati posisi yang paling paradoksal sekaligus paling strategis. Sebagai eksportir batu bara terbesar kedua di dunia, Australia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap emisi karbon global, baik secara langsung melalui konsumsi domestik maupun secara tidak langsung melalui ekspor bahan bakar fosil yang dibakar di negara-negara pengimpor. Pada saat yang sama, Australia adalah negara maju terdekat secara geografis dengan negara-negara Pasifik yang sedang menghadapi ancaman eksistensial, dan secara historis memosisikan diri sebagai kekuatan pengaruh utama di kawasan tersebut. Paradoks ini menempatkan Australia dalam posisi yang sangat rentan secara normatif terhadap tekanan moral dari negara-negara tetangganya di Pasifik.

Tekanan tersebut mencapai intensitas tertingginya pada COP26 di Glasgow tahun 2021, ketika Australia di bawah pemerintahan Morrison menjadi satu-satunya negara maju yang menolak memperkuat target pengurangan emisi untuk tahun 2030 sekaligus tidak menandatangani pledge pengurangan metana maupun pernyataan transisi energi bersih (University of Melbourne, 2022). Sikap ini mengundang kritik terbuka dari para pemimpin Pasifik yang disampaikan langsung di forum COP, sebuah tindakan yang secara diplomatik tidak lazim namun diperhitungkan secara strategis untuk memaksimalkan biaya reputasi bagi Australia di hadapan komunitas internasional. Carter (2024) menganalisis bahwa posisi Australia ini tidak semata-mata merupakan produk dari tekanan industri bahan bakar fosil domestik, tetapi juga mencerminkan budaya strategis dalam kebijakan luar negeri Australia yang cenderung

memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas komitmen lingkungan jangka panjang.

Pergeseran kebijakan yang terjadi pasca-2022 memberikan indikasi yang kuat bahwa tekanan diplomatik Pasifik, meskipun bukan satu-satunya faktor, memainkan peran katalisator yang bermakna. Pemerintahan Albanese yang mengambil alih kekuasaan pada Mei 2022 segera mengesahkan Climate Change Act 2022, yang menetapkan target reduksi emisi sebesar 43 persen pada tahun 2030 dibandingkan level 2005, serta mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama COP31 dengan negara-negara Pasifik sebagai gestur rekonsiliasi diplomatik yang eksplisit (PINA, 2022; ODI, 2025). Capaian paling konkret dari tekanan diplomatik Pasifik terhadap Australia dapat ditemukan dalam penandatanganan Tuvalu-Australia Falepili Union Treaty pada tahun 2023, sebuah perjanjian bilateral yang secara eksplisit mengakui perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial bagi Tuvalu dan untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum internasional memberikan hak mobilitas iklim yang tersistemasi bagi warga negara yang terancam kepunahan wilayahnya (Carnegie Endowment for International Peace, 2025).

Namun demikian, penelitian ini menekankan bahwa perubahan kebijakan Australia tidak dapat diatribusikan secara monokausal kepada tekanan diplomatik Pasifik. Carter (2024) mengingatkan bahwa budaya strategis yang instrumental dalam lingkaran kebijakan luar negeri Australia kerap beroperasi secara kontraproduktif, sehingga bahkan perubahan kebijakan yang terjadi pun sering kali dilatarbelakangi oleh kalkulasi kepentingan strategis regional yang lebih luas daripada respons tulus terhadap tekanan moral. Faktor-faktor domestik Australia, termasuk pergeseran opini publik, dinamika koalisi politik, dan tekanan dari komunitas bisnis yang mulai memperhitungkan risiko iklim, juga berperan penting dalam membentuk arah kebijakan tersebut. Dengan demikian, hubungan antara diplomasi Pasifik dan kebijakan iklim Australia bersifat kompleks, multivariat, dan tidak linear.

##### **5. Evaluasi Efektivitas: Capaian Normatif dan Batas Struktural**

Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas diplomasi iklim negara-negara Pasifik mengungkapkan gambaran yang bersifat ambivalen namun secara analitis kaya. Di satu sisi, terdapat capaian-capaian normatif yang konkret dan terverifikasi: tercantumnya target 1,5 derajat Celcius dalam Perjanjian Paris sebagai ambisi tertinggi rezim iklim global, terbentuknya Loss and Damage Fund pada COP27 sebagai pengakuan formal atas tanggung jawab negara-negara industri terhadap kerugian yang tidak dapat diadaptasikan, serta lahirnya Falepili Union Treaty sebagai preseden historis dalam hukum internasional terkait mobilitas iklim (UNFCCC, 2023; Carnegie Endowment, 2025). Capaian-capaian ini merupakan bukti nyata dari kemampuan negara-negara kecil untuk membentuk agenda dan norma global ketika mereka berhasil memobilisasi legitimasi moral secara efektif.

Di sisi lain, efektivitas tersebut menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan dan tidak dapat diabaikan. Pertama, terdapat kesenjangan yang persisten antara komitmen normatif yang dinyatakan dalam forum COP dengan implementasi aktual kebijakan iklim di tingkat nasional. Betzold (2020) mencatat bahwa gap antara pledge dan action tetap menjadi tantangan terbesar dalam rezim iklim internasional, dan negara-negara Pasifik tidak memiliki mekanisme koersif untuk memaksa

kepatuhan. Kedua, ketergantungan ekonomi dan politik negara-negara Pasifik terhadap Australia dan negara-negara maju lainnya membatasi ruang gerak diplomatik mereka, karena terlalu agresif dalam menekan dapat mengancam arus bantuan pembangunan yang mereka butuhkan. Ketiga dan paling fundamental, ketimpangan kekuasaan (power asymmetry) yang melekat dalam sistem internasional anarkis tetap menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi semata-mata melalui diplomasi moral.

Kerangka Small State Theory memberikan penjelasan yang memuaskan atas ambivalensi ini. Dalam sistem internasional yang masih didominasi oleh pertimbangan kekuatan material, kemampuan negara-negara kecil untuk memaksa kepatuhan terhadap norma-norma yang mereka advokasikan tetap terbatas secara inheren (Novikova, 2022). Diplomasi moral dapat menggeser diskursus, meningkatkan biaya reputasi, dan menstimulasi perubahan kebijakan di margin, tetapi tidak dapat mengubah kalkulasi kepentingan fundamental negara-negara besar secara menyeluruh. Oleh karena itu, diplomasi tekanan moral negara-negara Pasifik paling tepat dikarakterisasikan sebagai katalisator perubahan normatif dan kebijakan, bukan sebagai faktor penentu utama yang bersifat determinatif. Dimensi inklusivitas gender dalam proses diplomasi iklim juga perlu mendapat perhatian lebih: Saleemul Huq dkk. (2023) menekankan bahwa perempuan dan komunitas marginal yang menanggung beban terbesar dari dampak iklim masih sangat kurang terwakili dalam delegasi dan proses negosiasi, sehingga meningkatkan inklusivitas internal merupakan salah satu jalur untuk memperkuat efektivitas dan legitimasi diplomasi Pasifik di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim negara-negara Pasifik dalam forum Conference of the Parties merepresentasikan bentuk adaptasi strategis yang sophistis dari negara-negara kecil dalam menghadapi keterbatasan struktural yang melekat pada posisi mereka dalam sistem internasional. Tuvalu dan Kiribati, yang tidak memiliki kekuatan militer maupun bobot ekonomi yang signifikan, berhasil mengonstruksi kekuatan alternatif yang otentik melalui legitimasi moral yang bersumber dari kerentanan ekologis nyata yang mereka alami. Kerentanan ini bukan sekadar kondisi pasif yang menimpali mereka, melainkan secara aktif dikonversi menjadi modal diplomatik yang memberikan otoritas unik dalam diskursus iklim global.

Melalui arsitektur strategi diplomasi tiga lapis yang mencakup keterlibatan multilateral intensif, konsolidasi koalisi regional melalui AOSIS dan P-SIDS, serta pemanfaatan strategis media dan simbolisasi publik, negara-negara Pasifik berhasil menggeser isu perubahan iklim dari sekadar persoalan teknis negosiasi emisi menjadi isu etis, kemanusiaan, dan keadilan distributif yang memiliki resonansi moral yang kuat dalam opini publik internasional. Mekanisme naming, shaming, and framing yang mereka terapkan secara konsisten terbukti efektif dalam meningkatkan biaya reputasi bagi negara-negara penghasil emisi besar, khususnya Australia, dan berkontribusi sebagai katalisator bagi serangkaian perubahan kebijakan yang terjadi pasca-2022.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa pengaruh tersebut lebih dominan beroperasi pada level normatif dibandingkan menghasilkan perubahan kebijakan material yang substantif dan menyeluruh. Perubahan kebijakan iklim Australia pasca-2022 tidak dapat dijelaskan sebagai hasil tunggal dari tekanan diplomatik Pasifik, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara tekanan eksternal dan

dinamika politik domestik Australia. Diplomasi Pasifik berfungsi sebagai katalisator yang mengakselerasi dan melegitimasi perubahan yang juga didorong oleh faktor-faktor domestik dan internasional lainnya. Temuan ini menegaskan relevansi Small State Theory dalam menjelaskan kondisi di mana pengaruh normatif negara kecil memiliki batas tertentu yang ditentukan oleh struktur kekuasaan yang lebih luas dalam sistem internasional.

Implikasi dari penelitian ini melampaui konteks Pasifik semata. Studi ini mendemonstrasikan bahwa dalam rezim internasional berbasis norma seperti UNFCCC, legitimasi moral yang bersumber dari pengalaman nyata dapat menjadi instrumen kekuasaan yang efektif, meskipun tidak omnipoten. Bagi negara-negara Pasifik, peningkatan efektivitas jangka panjang dari diplomasi iklim mereka memerlukan kombinasi antara strategi tekanan moral yang telah terbukti efektif dengan pendekatan komplementer berupa diplomasi ekonomi yang lebih sistematis, penguatan kemitraan strategis dengan aktor-aktor non-negara dan civil society global, serta advokasi yang lebih inklusif secara gender untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas perjuangan mereka di hadapan komunitas internasional.

## REFERENSI

- Betzold, C. (2020). Adapting to climate change in small island developing states. *Climatic Change*, 160(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02531-5>
- Campbell, J., & Warrick, O. (2023). Climate change and migration issues in the Pacific. *Asia Pacific Viewpoint*, 64(1), 3–17. <https://doi.org/10.1111/apv.12345>
- Carnegie Endowment for International Peace. (2025). Australia-Tuvalu Falepili Union: The first bilateral climate mobility treaty. <https://carnegieendowment.org/research/2025/09/australia-tuvalu-falepili-union>
- Carter, G. (2024). A dysfunctional family: Australia's relationship with Pacific Island states and climate change. *Australian Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2316098>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Hay, J. E. (2013). Small island developing states: Coastal systems, global change and sustainability. *Sustainability Science*, 8(3), 309–326. <https://doi.org/10.1007/s11625013-0210-x>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press.
- Intermestic: Journal of International Studies. (2025). Tuvalu's foreign policy strategy: Confronting the climate crisis and the country's existential threat. Intermestic, Universitas Padjadjaran. <https://intermestic.unpad.ac.id>
- IntechOpen. (2025). Small states: A new research agenda. <https://www.intechopen.com/chapters/1231852>
- Kelman, I. (2021). *Disaster by choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes*. Oxford University Press.

- Klöck, C., Castro, P., & Michaelowa, K. (2024). Beyond AOSIS: Small island states' participation at COP27. *Climate Policy*, 24(2), 215–230. <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2287654>
- Leal Filho, W., Balogun, A. L., Olayide, O. E., Azeiteiro, U. M., Ayal, D. Y., Chavez Muñoz, P. D., ... & Nagy, G. J. (2019). Assessing the impacts of climate change in cities and their adaptive capacity: Towards transformative approaches to climate change adaptation and poverty reduction in urban areas in a set of developing countries. *Science of the Total Environment*, 692, 1175–1190.
- McDonald, M. (2021). Pacific Islands, climate change and security discourse. *International Politics*, 58(2), 210–227. <https://doi.org/10.1057/s41311-020-00253-1>
- Morgan, W., Carter, G., & Manoa, P. (2024). Leading from the frontline: A history of Pacific climate diplomacy. *The Journal of Pacific History*, 59(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00223344.2024.2301123>
- Novikova, I. N. (2022). Small states in international relations: Some theoretical aspects. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92(Suppl 9), S890–S901. <https://doi.org/10.1134/S1019331622150072>
- ODI. (2025). COP31: Awkward alliance or promising opportunity? <https://odi.org/en/insights/cop31-awkward-alliance-or-promising-opportunity/>
- Ourbak, T., & Magnan, A. K. (2022). The Paris Agreement and climate governance in small island states. *Regional Environmental Change*, 22(3), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10113-022-01933-0>
- Pacific Island News Association (PINA). (2022). Australia will bid for 2026 climate summit with Pacific, but will face pressure to do more this year at COP27. <https://pina.com.fj>
- Panke, D. (2020). Small states in multilateral negotiations: What have we learned? *International Politics*, 57(3), 456–472. <https://doi.org/10.1057/s41311-019-00199-0>
- Robert Bosch Stiftung. (2023). Call to action: Rising sea levels – make the future of the Pacific Islands a core priority for Germany's climate foreign policy. <https://www.boschstiftung.de>
- Saleemul Huq, S., Roberts, E., & Fenton, A. (2023). Loss and damage. *Nature Climate Change*, 3(11), 947–949. <https://doi.org/10.1038/nclimate2046>
- Social Science Research Journal Vol.2 No.3 Oktober 2025 | 11 Tandfonline. (2024). Australia and Pacific climate diplomacy: Navigating regional tensions. *Australian Journal of International Affairs*. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.00001>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2023). Report of the Conference of the Parties on its sessions. <https://unfccc.int>
- University of Melbourne. (2022). Australia hopes to change climate reputation at COP27. <https://www.unimelb.edu.au/climate/news-and-events/news/australia-hopes-tochange-climate-reputation-at-cop27>
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sagepublication